

NOTA DINAS
No. ~~144.a~~/ND/XVIII.JMB/4/2017

Kepada Yth. : Kepala Direktorat PSMK
Dari : Kepala Perwakilan Provinsi Jambi
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Triwulan I Tahun 2017
Tempat, Tanggal : Jambi, **13** April 2017

Sehubungan dengan berakhirnya kegiatan Triwulan I Tahun 2017 pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi, bersama ini kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Triwulan I Tahun 2017 pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Demikian Nota ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Parna
NIP 195811151986031001 /

Tembusan Yth:

1. Auditor Utama Keuangan Negara V
2. Kepala Auditorat V.B



**LAPORAN REVIU PENCAPAIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
TRIWULAN I**

2017

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan Pelaporan	1
3. Target Pencapaian Kinerja	1
4. Lingkup Pelaporan Pencapaian Kinerja	2
5. Pencapaian Kinerja	4
6. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja	11

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Target Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi sesuai dengan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja Tahun 2017.....	2
Tabel 2 Realisasi Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi Triwulan I Tahun 2017.....	4

**LAPORAN REVIU PENCAPAIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
BERDASARKAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA BPK
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2017**

1. Latar Belakang

Berdasarkan Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK dan penandatanganan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2017, perlu disusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Laporan ini untuk memberikan informasi mengenai tingkat kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi sampai dengan Triwulan I Tahun 2017 dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja serta masukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Metode penilaian atas pencapaian kinerja dalam SIMAK BPK dengan cara membandingkan realisasi pencapaian suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target IKU yang telah ditetapkan pada Pernyataan Komitmen Tahun 2017.

2. Maksud dan Tujuan Pelaporan

Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi berdasarkan SIMAK BPK mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi periode Triwulan I Tahun 2017;
- b. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi periode Triwulan I Tahun 2017; dan
- c. Memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ditemui dalam pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada masa mendatang.

3. Target Pencapaian Kinerja

Target pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2017 yang telah disepakati oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi dan Auditor Utama KN V dituangkan dalam PKPK 2017 tanggal 11 Januari 2017. Rincian Sasaran Strategis (SS) dan target IKU 2017 sebagai berikut:

Tabel 1
Target Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi
Sesuai Dengan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
SS 1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	25%
SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%
	IKU 3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%
	IKU 3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,7
	IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IKU 3.6	Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%
SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	24
	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jambi	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%
	IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	0
	IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%
	IKU 5.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%
	IKU 5.6	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%
	IKU 5.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2
	IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%
	IKU 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik Dan Peraturan Disiplin	100%
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jambi	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IKU 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	93%
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jambi	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	82%

4. Lingkup Pelaporan Pencapaian Kinerja

Laporan Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi berdasarkan SIMAK BPK periode Triwulan I Tahun 2017 meliputi 28 IKU yaitu:

- 1) IKU 1.1, Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

- 2) IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH
- 3) IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara
- 4) IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli
- 5) IKU 1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
- 6) IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan
- 7) IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP
- 8) IKU 3.1 Pemenuhan *Quality Control (QC)* Pemeriksaan
- 9) IKU 3.2 Pemenuhan *Quality Assurance (QA)* Pemeriksaan
- 10) IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
- 11) IKU 3.4 Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK
- 12) IKU 3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
- 13) IKU 3.6 Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang
- 14) IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
- 15) IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
- 16) IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
- 17) IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja
- 18) IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
- 19) IKU 5.3 Jumlah Usulan *Best-Practice*
- 20) IKU 5.4 Persentase Penyebaran *Best-Practice*
- 21) IKU 5.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja
- 22) IKU 5.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan
- 23) IKU 5.7 Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan
- 24) IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
- 25) IKU 5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin
- 26) IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
- 27) IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
- 28) IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

5. Pencapaian Kinerja

Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi berdasarkan SIMAK BPK periode Triwulan I Tahun 2017 meliputi 28 IKU, yaitu:

Tabel 2
Realisasi Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi Triwulan I Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2017	Rencana Pencapaian Target Triwulan I 2017	Realisasi Triwulan I 2017
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	60%	60,94%
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%
IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%
IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	0	0
IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	100%
IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	25%	0%	0%
IKU 3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%	0%	0%
IKU 3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	0%	0%
IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	0%	0%
IKU 3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,7	0	0
IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	0%	0%
IKU 3.6	Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100%
IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	0%	0%
IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	24	0	0
IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	0%	0%
IKU 5.1	Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja	A	0	0
IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	0%	0%
IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	0	0	0
IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	0%	0%
IKU 5.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%
IKU 5.6	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%
IKU 5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	1	1
IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90%	90,3%
IKU 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%
IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	40%	14%
IKU 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	93%	40%	25,81%
IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	82%	15%	47,61%

1) IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU 1.1 menunjukkan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan negara. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Capaian IKU 1.1. BPK Perwakilan Provinsi Jambi untuk Triwulan I Tahun 2017 sebesar 60,94% atau di atas target yang ditetapkan sebesar 60%.

2) IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

IKU 1.2 menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas temuan berindikasi tindak pidana untuk dapat segera ditindaklanjuti. IKU ini merupakan IKU bonus, dimana jika tidak ada temuan yang berindikasi tindak pidana, maka tidak mempengaruhi skor kinerja secara keseluruhan.

Capaian IKU 1.2 untuk Triwulan I Tahun 2017 sebesar 100%, dimana belum ada penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH.

3) IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara

IKU 1.3 menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan yang meliputi perhitungan kerugian negara/daerah (yang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPK). IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan terkait Penghitungan Kerugian Negara. IKU ini merupakan IKU bonus, dimana jika tidak ada permintaan perhitungan kerugian negara, maka tidak mempengaruhi skor kinerja secara keseluruhan.

Capaian IKU 1.3 untuk Triwulan I Tahun 2017 sebesar 100%, dimana belum ada Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara.

4) IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli

IKU 1.4 menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan terkait Pemberian Keterangan Ahli. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan sesuai tugas dan wewenang BPK. IKU ini merupakan IKU bonus, dimana jika tidak ada permintaan pemberian keterangan ahli, maka tidak mempengaruhi skor kinerja secara keseluruhan.

Capaian IKU 1.4 untuk Triwulan I Tahun 2017 sebesar 100%, dimana terdapat 2 (dua) permintaan Pemberian Keterangan Ahli dan keduanya telah dipenuhi, dengan perihal sebagai berikut.

- (1) Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Sungai Aur Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007;

(2) Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Suak Kandis - Desa Simpang pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi TA 2012.

5) IKU 1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

IKU 1.5 menunjukkan tingkat produktivitas AKN/perwakilan terkait pelaksanaan tugas dalam hal memberikan bahan pertimbangan dan bahan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. IKU ini bertujuan untuk mengukur kontribusi AKN terkait pelaksanaan tugas/kewenangan BPK memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

Capaian IKU 1.5 untuk Triwulan I Tahun 2017 sebesar 0 sesuai target, karena belum ada Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang.

6) IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan

IKU 2.1 menunjukkan tingkat kualitas perencanaan pemeriksaan di masing-masing AKN. IKU ini mengukur kualitas perencanaan yang ditunjukkan dari konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dibandingkan dengan rencana pemeriksaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP).

Capaian IKU 2.1 untuk Triwulan I Tahun 2017 masih 100% karena jumlah pemeriksaan masih konsisten dengan strategi pemeriksaan serta belum ada revisi RKP untuk objek pemeriksaan yang diganti yang dapat berdampak pada pengurangan skor.

7) IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP

IKU 2.2 menunjukkan tingkat proporsi kegiatan pemeriksaan kinerja yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah LHP pemeriksaan kinerja terhadap jumlah seluruh LHP yang dihasilkan. IKU ini bertujuan untuk mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja. BPK diarahkan pada pelaksanaan *insight* yang dilakukan melalui pemeriksaan kinerja.

Capaian IKU 2.2 untuk Triwulan I Tahun 2017 masih 0% karena belum ada pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan, sesuai target yang ditetapkan.

8) IKU 3.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan

IKU 3.1 menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP). IKU ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.

Capaian IKU 3.1 pada Triwulan I Tahun 2017 masih 0%, karena belum ada pemeriksaan yang selesai dilaksanakan.

9) IKU 3.2 Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan

IKU 3.2 menunjukkan sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Assurance* (QC) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). IKU ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.

Capaian IKU 3.2 pada Triwulan I Tahun 2017 masih 0%, karena belum ada pemeriksaan yang selesai dilaksanakan.

10) IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP

IKU 3.3 menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh satker pemeriksaan. Sesuai dengan arahan Badan, LHP tidak boleh mengandung kesalahan (*zero defect*) maka LHP harus 100% akurat. IKU ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Capaian IKU 3.3 pada Triwulan I Tahun 2017 masih 0% karena perhitungan konsistensi dan akurasi penyajian LHP dilaksanakan setiap semester pada Forum IHPS I dan II.

11) IKU 3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

IKU 3.4 menunjukkan indikator tingkat kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa AKN dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK, yang diukur berdasarkan persepsi auditee melalui survei tingkat kepuasan. IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

Capaian IKU 3.4 pada Triwulan I Tahun 2017 masih 0 karena belum ada pemeriksaan yang selesai di Triwulan I Tahun 2017 sehingga belum ada kepala daerah yang mengisi kuesioner.

12) IKU 3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran terhadap ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas/*stakeholder*.

Capaian IKU 3.5 pada Triwulan I Tahun 2017 masih 0 karena belum ada pemeriksaan yang selesai.

13) IKU 3.6 Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang

IKU 3.6 menunjukkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN, yang mensyaratkan bahwa tidak ada LHP yang digugat dan dinyatakan kalah di pengadilan. IKU ini bertujuan untuk menunjukkan kualitas LHP BPK. Jika LHP digugat dan dinyatakan kalah akan menunjukkan kualitas LHP yang kurang baik. Atau sebaliknya, jika BPK memenangkan tuntutan dari pihak ketiga berarti LHP BPK berkualitas.

Capaian IKU 3.6 pada Triwulan I Tahun 2017 masih 100% karena sampai dengan Triwulan I Tahun 2017, tidak ada LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang digugat.

14) IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IKU 4.1 menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK No.2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. IKU ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat terperiksa.

Capaian IKU 4.1 pada Triwulan I Tahun 2017 masih 0% karena pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan baru akan dilaksanakan pada bulan Juni 2017 mendatang.

15) IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang disusun oleh AKN/Perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama Revbang. IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja AKN/perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara sehingga efektivitas penyelesaian kerugian negara baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran jumlah ganti rugi dapat tercapai.

Capaian IKU 4.2 pada Triwulan I Tahun 2017 masih 0 karena belum ada pemantauan penyelesaian kerugian negara yang dilaksanakan.

16) IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara oleh Auditorat/Perwakilan ke Direktorat Evaluasi dan Perencanaan Pemeriksaan adalah dalam rangka penyusunan bahan IHPS. Penyampaian yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara fisik dan melalui input ke Sistem Informasi Kerugian Daerah (SIKAD). IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara, khususnya melalui SIKAD, agar tepat waktu.

Capaian IKU 4.3 pada Triwulan I Tahun 2017 masih 0 karena belum ada pemantauan penyelesaian kerugian negara yang dilaksanakan.

17) IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satuan kerja.

Capaian IKU 5.1 pada Triwulan I Tahun 2017 masih 0 karena evaluasi baru akan dilaksanakan sekitar Triwulan IV Tahun 2017.

18) IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IKU 5.2 mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong *IT culture* di BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas

dan fungsi dalam organisasi BPK. IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Capaian IKU 5.1 pada Triwulan I Tahun 2017 masih 0 karena belum ada laporan *IT Culture* dari Biro TI selaku penilai.

19) IKU 5.3 Jumlah Usulan *Best-Practice*

Best-practice adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi *best-practice*.

IKU ini mengukur tingkat penyusunan jumlah *best-practice* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK.

IKU 5.3 masih menjadi IKU bonus di tahun 2017 dan tidak mempengaruhi skor kinerja.

20) IKU 5.4 Persentase Penyebaran *Best Practice*

Best-practice yang telah dilegalisasi menjadi pengetahuan, selanjutnya akan disebarluaskan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai BPK. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah *best-practice* yang disebar untuk pegawai.

IKU ini mengukur tingkat penyebaran *best-practice* pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan.

IKU 5.4 masih menjadi IKU bonus di tahun 2017 dan tidak mempengaruhi skor kinerja.

21) IKU 5.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Ketepatan waktu penyampaian LAK adalah sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen No.431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit Kerja Pelaksana BPK yaitu 1,5 (satu setengah) bulan setelah tahun anggaran berakhir. IKU ini bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan LAK secara tepat waktu.

Capaian IKU 5.5 pada Triwulan I Tahun 2017 adalah 100% karena LAK Tahun 2016 telah disampaikan tepat waktu sesuai Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Jambi No.33.a/ND/XVIII.JMB/1/2017 tanggal 27 Januari 2017.

22) IKU 5.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan

Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan adalah sesuai dengan POS Perencanaan, yakni tanggal 10 di bulan berikutnya. IKU ini bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan laporan bulanan secara tepat waktu.

Capaian IKU 5.6 pada Triwulan I Tahun 2017 telah 100% karena Laporan Bulanan untuk Bulan Januari, Februari, dan Maret telah disampaikan tepat waktu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

23) IKU 5.7 Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan

Kegiatan *media relation* merupakan salah satu bentuk kegiatan hubungan dan kerjasama dengan media massa. IKU ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarluaskan hasil pemeriksaan BPK secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa.

Capaian IKU 5.7 pada Triwulan I Tahun 2017 adalah sejumlah 1 (satu) poin sesuai dengan target, dimana telah dilaksanakan dua wawancara dengan media massa pada Triwulan I Tahun 2017.

24) IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK, untuk terwujudnya suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK. IKU ini bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai.

Capaian IKU 5.8 pada Triwulan I Tahun 2017 sebesar 90,3% di atas target yang telah ditetapkan sebesar 90%, dimana capaian sama dengan capaian pada Triwulan IV Tahun 2016 karena belum ada pengadaan dan penghapusan BMN sejak awal tahun.

25) IKU 5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

Kode Etik Pegawai merupakan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No.2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, disiplin pegawai merupakan kedisiplinan sesuai dengan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai.

Capaian IKU 5.9 pada Triwulan I Tahun 2017 adalah 100% karena tidak ada pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang melanggar kode etik dan peraturan disiplin.

26) IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun. *Cut off* perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker lama.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan.

Capaian IKU 6.1 pada Triwulan I Tahun 2017 adalah 14%, di bawah target yang ditetapkan sebesar 40%. Dari 50 orang pemeriksa, baru tujuh orang pemeriksa yang telah memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa sebesar 40 jam, disebabkan tenaga pemeriksa pada Triwulan I Tahun 2017 terserap untuk persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2016.

27) IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan.

Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada lingkup AKN/Perwakilan dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. *Cut off* perhitungan jumlah pegawai sama dengan *cut off* pada IKU 6.1.

Capaian IKU 6.2 pada Triwulan I Tahun 2017 adalah 25,81%, di bawah target yang ditetapkan sebesar 40%. Dari 31 orang pejabat struktural dan pegawai penunjang/pendukung, baru delapan orang yang telah memenuhi standar jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa) yang dipersyaratkan sebesar 20 jam, disebabkan sebagian besar pejabat struktural dan pegawai penunjang/pendukung dilibatkan dalam persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2016.

28) IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dinilai dari empat indikator, yaitu:

- (1) Penyerapan anggaran
- (2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- (3) Pencapaian keluaran
- (4) Efisiensi

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Capaian IKU 7.1 pada Triwulan I Tahun 2017 masih 0%, karena belum ada Rekapitulasi Perhitungan Kinerja Anggaran yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan sebagai tim penilai.

6. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja

Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi periode Triwulan I Tahun 2017 mencatat beberapa pencapaian positif, yaitu:

- a. Pencapaian IKU periode Triwulan I Tahun 2016 secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun khusus untuk IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa dan IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa), realisasi masih di bawah target, karena diklat di kantor perwakilan baru akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2017.
- b. Terdapat IKU realisasinya di atas target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2016, yaitu IKU 1.1 Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti, IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan, IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana, dan IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.

Jambi, April 2017

Mengetahui
Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Jambi



Parna
NIP 195811151986031001

Manajer IKU
BPK Perwakilan Provinsi Jambi



Hermawan
NIP 196604071986031001